

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT

Allan Diego Ambarak

NPP. 29.1856

*Asdaf Kabupaten Sorong, Papua Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.1856@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The preparation of this final report is titled "Community Political Participation in the 2019 Presidential and Vice Presidential Elections in Sorong Regency, West Papua Province".* **Purpose:** *The problems observed in this observation include: There is still a low rate of political participation of the community in large districts where there are 68,686 unused ballots. This study aims to find out and examine the political participation of sorong people in democratic activities, especially in election activities. This research is Qualitative Research using inductive approach.* **Method:** *The data collection techniques used by the authors in this study are by using interview techniques, and documentation. Then the type of data used is to use primary and secondary data types. In analyzing the data, the author uses data collection steps, data reduction, and data display.* **Result:** *The results of the analysis and data that the author obtained while carrying out the internship, can be concluded that the political participation of the community in Sorong regency has been good but not yet maximized because there are people who can not use their voting rights because it is not facilitated.* **The Conclusion :** *Community participation in sorong in the 2019 presidential and vice presidential elections can be considered good because it achieved the target of 73 percent of people's political participation in the voting set by the kpu nationally in the 2019 presidential election.* **sugegestion :** *Therefore, it is expected that the Sorong Regency Government and sorong regency KPU are able to facilitate and increase socialization to increase public participation in the general election.*

Keywords : *Presidential Election; Community political participation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Masalah yang diamati dalam pengamatan ini yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di wilayah distrik-distrik besar dimana terdapat 68.686 surat suara yang tidak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sorong dalam kegiatan berdemokrasi, terkhususnya dalam kegiatan pemilihan umum. **Tujuan :** Untuk mengetahui permasalahan kenapa tingkat partisipasi politik masyarakat kabupaten sorong kurang pada saat pelaksanaan pemilihan dan alasan apa saja yang menghambat dalam pemilihan. **Metode :** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah pengumpulan data, reduksi data, dan display data. **Hasil/Temuan :** partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sorong sudah baik namun belum maksimal karena terdapat masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terfasilitasi dan juga banyak data yang kurang valid atau update dari dinas pencacatan sipil dan juga KPU. **Kesimpulan :** Partisipasi masyarakat di Sorong pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat dinilai baik karena mencapai sasaran 73 persen partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU secara Nasional pada PILPRES 2019. **Saran :** diharapkan Pemerintah Kabupaten Sorong dan KPU Kabupaten Sorong mampu untuk memfasilitasi dan meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Kata Kunci : Pemilihan Presiden; Partisipasi politik masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi di mana pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. tahun 2019 dilaksanakan pemilihan presiden serentak di seluruh indonesia, Pemilihan umum ini masyarakat memberikan suaranya dengan cara datang langsung ke tps yang telah disediakan oleh KPU selaku penyelenggara. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus yang dilakukan oleh BPS, penduduk indonesia pada tahun 2019 berjumlah 267 juta jiwa dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 319 juta jiwa pada tahun 2045 sehingga menobatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk terbesar di dunia, dengan sistem politiknya adalah demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, indonesia tentu mempunyai karakteristik masyarakat yang heterogen. berdasarkan hal itu dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakatnya dalam perencanaan maupun pada pelaksanaan pemilu, hal ini merupakan ciri dari suatu negara demokrasi. Sebab aspek terpenting dalam sebuah negara yang menerapkan tatanan demokrasi adalah partisipasi dari masyarakat.¹ Pemilu dalam sistem demokrasi pancasila mempunyai peran sebagai tolak ukur dari demokrasi serta sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasar kekuasaan rakyat. Bentuk cerminan dari suatu negara demokrasi yang ideal adalah dengan terwujudnya sebuah pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil terlepas dari segala bentuk kecurangan. Oleh sebab itu, agar sebuah pemilu yang ideal dapat terwujud diperlukan

¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1307583/bps-proyeksi-jumlah/-penduduk/-indonesia-319-juta-jiwa/-pada-2045/full&view=ok>

sebuah perangkat hukum yang bisa mengatur dan mengelola proses pelaksanaan pemilu sekaligus bisa melindungi para penyelenggara, pemantau, kandidat, pemilih serta warga negara pada umumnya dari segala bentuk tindak kecurangan berupa penipuan, intimidasi, dan penyuapan yang akan memengaruhi hasil dari pemilu. Hal ini bisa diantisipasi dengan cara pemberian pemahaman pemilu berupa sosialisasi politik agar seluruh unsur yang terlibat memahami mekanisme pemilu yang baik dan benar sehingga bisa terwujudnya suatu pemilu yang ideal. Pemilu merupakan sistem pemilihan yang dilakukan untuk memilih pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Berbicara tentang partisipasi politik masyarakat, adanya bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut merupakan indikator yang paling mendasari dari kesuksesan dan kualitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpinnya. Dalam penyelenggaraannya Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia” dan asas “Jurdil” yang merupakan “Jujur dan Adil”. Asas “Luber dan Jurdil” ini di dalam pemilu yang menurut UU No. 10 tahun 2008² yang meliputi:

1. Langsung, yang diartikan bahwa disini rakyat yang dikategorikan sebagai pemilih memiliki hak yang secara langsung dapat memberikan suaranya sesuai dengan kehendaknya tanpa harus melalui perantara orang lain.
2. Umum, yang diartikan bahwa negara yang memiliki usia 17 tahun ataupun yang telah menikah memiliki hak untuk ikut berpartisipasi untuk memilih dan yang telah berusia 21 tahun memiliki hak pula untuk di pilih dengan tanpa adanya diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, yang diartikan bahwasanya rakyat dapat memilih dalam pemilihan umum memiliki hak untuk menurut dengan hati nuraninya.
4. Rahasia, yang diartikan bahwa setiap orang yang disini disebut rakyat dijamin peratran saat melakukan pemilihan menyuarakan hak pilihnya agar tidak diketahui siapapun kepada siapa suaranya nanti diberikan (secret ballot).
5. Jujur, yang disini diartikan bahwa dalam pemberian hak suara dilakukan dengan sebenar-benarnya.
6. Sikap jujur juga diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diperuntukan kepada pemerintah dalam pemilihan umum.
7. Adil, yang diartikan bahwa partai politik dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan umum (pemilu) itu sendiri perlu adanya partisipasi masyarakat dan integritas dari penyelenggara pemilu dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017³ Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (8) mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam pelaksanaan pemilu.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

“Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung

² Undang Undang No 10 Tahun 2008, n.d.

³ Undang Undang No 7 Tahun 2017, n.d.

atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)⁴, dimana partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan ini karena masyarakatlah yang memberikan hak suara mereka dalam pemilihan. Partisipasi dalam politik dapat mengambil bentuk yang aktif atau pasif, yang aktif mulai dari menduduki jabatan sampai pemberian suara pemilu. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah dilakukan. Di samping mereka yang aktif berpartisipasi dalam politik, ada juga mereka yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. “Dua variabel mempengaruhi terkait tinggi maupun rendah tingkat partisipasi politik masyarakat”⁵. Kabupaten Sorong sendiri adalah merupakan kabupaten dengan pemilih terbanyak ke tiga di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kutipan artikel medcom.id, bahwa Tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilpres 2019 di Papua Barat mencapai partisipasi 88% dari masyarakat dengan banyak pemilih yaitu 740.981⁶. Hal ini berbalik belakang dengan pencapaian baik tersebut, masih terdapat kabupaten yang tingkat partisipasinya kurang, salah satunya adalah kabupaten sorong. Masih terdapat beberapa distrik atau kecamatan dengan tingkat partisipasi rendah, bahkan ada yang di bawah 50% hal ini tentu mendapat perhatian lebih dari pihak KPU dan pemerintah untuk memperbaikinya⁷. Tetapi ada beberapa masalah yaitu adalah di Kabupaten Sorong sendiri ada beberapa kecamatan yang baru dimekarkan dan anggota KPU sendiri terkendala dalam pendistribusian surat suara, ada juga masalah lain yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat di kabupaten sorong sendiri dalam memberikan suaranya karena mereka lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, masyarakat juga kurang dalam partisipasi politiknya dan memunculkan sifat tidak acuh tak acuh. Masalah ini sendiri memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari KPU itu sendiri tapi juga pemerintah daerah, kandidat pemilu, dan masyarakat itu sendiri. Hal-hal ini yang menjadi masalah saat pelaksanaan pemilihan dimana KPU harus bisa lebih lagi dalam sosialisasi bagi masyarakat Kabupaten Sorong terutama karena masih kurang dalam partisipasinya saat pemilihan umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks partisipasi masyarakat, pengaruh pasangan calon dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdinandus Meyer pada tahun 2020 yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Karo Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Dusun VI Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Periode 2019-2024”. Adapun metode yang di gunakan adalah sama dengan peneliti gunakan dimana peneliti menggunakan metode yang sama, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini dimana masyarakat karo hanya sekedar mengikuti pilpres saja dan tidak begitu peduli dengan hasilnya serta merasa puas dengan pemerintahan yang sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Karyadi dan Aldri Frinaldi pada tahun 2020 yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kerinci”. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memiliki persamaan dengan metode serta pendekatan yang di gunakan peneliti. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelian yang berbeda dengan peneliti. Hasil dari penelitian ini juga

⁴ Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 2013)hal 184.

⁵ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi* (Padang: UNP Press, 2012)hal 20.

⁶ “Partisipasi Pemilih Di Papua Barat Mencapai 90 Persen,” *Medcom*, 2019.

⁷ “Aimas Sudah Memasukan Logistik Hasil Pemilu Ke KPU Kabupaten Sorong,” *Suararakyat*, 2019.

menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di kabupaten kerinci sendiri terbilang tinggi karena peran dari KPU sendiri dalam sosialisanya serta juga peran dari para pasangan calon yang membuat partisipasinya meningkat. Penelitian sbelumnya yang ke tiga yaitu jurnal ilmu pemerintahan yang di tulis oleh Mayang Indriany Risma Biru degan judul “**Pertisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara**”. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti juga menggunakan metode dan pendekatan yang sama. Perbedaan adalah dari fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya di karenakan peran dari KPU sendiri dalam sosialisanya serta pembinaan bagi relawan demokrasi dimana relawan ini sangat membantu dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang sebenarnya sama dengan beberapa penelitian sebelumnya tetapi yang berbeda yaitu tempat serta hasil yang didapat dimana disini masyarakat papua di kabupaten sorong ternyata lebih tertarik kepada pemilihan kepala daerah daripada pemilihan presiden hal ini disebabkan karena kedekatan antara pasangan calon yang sdimana masyarakat lebih dekat karena kepala daerah di Papua sendiri harus masyarakat asli Papua itu sendiri. Serta dengan informan sendiri penulis mengambil sample masyarakt terutama masyarakat papua sendiri yang dimana paling berpengaruh dalam partisipasi politiknya. GAP penelitian pun hanya ada terjadi pada lokus penulis. Selain itu teori yang digunakan pun berbeda dengan teori yang digunakan penelitian-penelitian sebelumnya dimana menggunakan teory dari Ramlan Surbakti.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang masalah-masalah apa saja yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sorong pada tahun 2019 dimana saat pemilihan presidenya terbilang kurang dan juga alasan kenapa masyarakat tidak ikut memilih.

II. METODE

Penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian⁸. Penelitian adalah proses yang sistematis dan teratur dalam menganalisis suatu permasalahan dan mencari jalan keluar atau pemecahan masalah yang dihadapi. Metodologi penelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proposal penelitian⁹. Nursapia Harahap, menjelaskan bahwa “penelitian adalah usaha yang lakukan untuk mencari data dan fakta tentang suatu hal dengan kaidah-kaidah ilmiah”¹⁰. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), sering juga disebut dengan penelitian taksonomi (*taksonomic research*). Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Selain itu, pendekatan deskriptif merupakan metode yang berasal dari fakta empirik dan konkret dalam menemukan suatu kebenaran sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan¹¹. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan peneliti ingin memahami kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dan berkaitan langsung dengan subjek penelitian dengan menggunakan cara deskripsi. Sehingga jenis pendekatan

⁸ Harahap N, *Penelitian Kualitatif* (medan: Wal ashri Publishing, 2020)hal 29.

⁹ Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung: 2020).

¹⁰ Harahap N, *Penelitian Kualitatif* (medan: Wal ashri Publishing, 2020)hal 1.

¹¹ Samsu, *METODE PENELITIAN : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (2017)hal 65.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif yang memusatkan perhatian penelitian terhadap pemecahan suatu permasalahan yang sedang terjadi dilapangan¹². Peneliti mencoba melihat secara langsung fenomena yang terjadi dilapangan dan mengungkapkan serta mendeskripsikan fenomena yang sebenarnya terjadi dengan mendokumentasikan fakta-fakta ilmiah di lapangan.

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta-fakta dilapangan tentang “partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kabupaten sorong tahun 2019” sesuai dengan fakta dilapangan. Untuk informan sendiri yaitu ketua KPU Kabupaten Sorong, Kasubag teknis pemilu, Camat Aimas dan Lurah Aimas serta masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Ramlan Surbakti yang terdiri dari 5 dimensi antara lain kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, status social dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. Hasil dari pengamatan dan pengumpulan data terhadap fenomena yang terjadi di lokasi magang, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan yaitu meneliti fenomena-fenomena yang terjadi untuk mendapatkan suatu hasil yang akurat dari setiap fenomena tersebut. berdasarkan masalah-masalah yang ditemui penulis selama di lokasi magang yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat di wilayah kabupaten sorong. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi karena keputusan politik yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk mengambil bagian dalam menentukan isi keputusan politik. Partisipasi masyarakat dalam politik dijamin oleh Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai warga Negara, masyarakat berhak untuk berpendapat, berserikat, memilih dan dipilih, mendapatkan keadilan, serta kedudukan yang sama dalam hukum. Pemilihan umum adalah suatu sarana untuk masyarakat memberikan mandatnya kepada wakilnya dan memilih pemimpin serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pelaksanaan pemilu memerlukan partisipasi dari masyarakat karena hal ini merupakan modal pokok secara kuantitas menentukan hasil keberhasilan pemilu. Masyarakat yang berpartisipasi terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2018 mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Secara lebih sempit partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya secara benar sehingga angka suara tidak sah rendah. Sejauh ini tidak ada ketentuan dalam suatu pemilu tentang batas partisipasi tersebut karena pada hakikatnya secara yuridis, memilih adalah hak bukan kewajiban. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019 dan yang menjadi pemenang adalah pasangan nomor urut satu Ir. H. Joko widodo dan Prof. dr. KH. Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024. Selain terselenggara dengan lancar, aman dan damai, KPU Kabupaten Sorong mencatat angka partisipasi masyarakat mencapai 73,75 persen. Terkhusus untuk 5 distrik besar yang berada di kabupaten sorong yang mengalami penurunan partisipasi masyarakat, dan lebih terkhusus

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 2016)hal 9.

untuk Distrik Aimas yang berada pada ibukota kabupaten namun partisipasi yang diberikan masyarakat tergolong rendah, masyarakat yang berpartisipasi mencapai 68,77 persen. Secara total angka partisipasi politik yang ditetapkan oleh KPU sebesar 77,5 persen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Teknik pengumpulan data dimana yang dilakukan penulis adalah berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang ada. Masyarakat Kabupaten Sorong dapat dinilai aktif berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Walaupun angka partisipasi hanya mencapai angka 73,75 persen ini merupakan kemajuan yang dicapai. Tujuannya dengan semakin aktif masyarakat berpartisipasi maka dapat tercipta demokrasi yang aktif.

Secara umum penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah mencapai target secara keseluruhan di Kabupaten Sorong.
- b. Situasi Kabupaten Sorong tetap kondusif baik sebelum ataupun sesudah penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan keberhasilan KPU Kabupaten Sorong melakukan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah dan kepolisian serta kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi dan keamanan.
- c. Masyarakat sadar akan haknya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Masyarakat juga patuh dengan menjaga dan mematuhi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, menerima hasilnya, serta menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

Kesadaran Politik

Secara umum untuk menambah partisipasi masyarakat untuk mengambil peran dalam sebuah kegiatan diperlukan kesadaran diri dari tiap-tiap individu. Partisipasi akan bertambah secara otomatis apabila setiap individu masyarakatnya sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi. Dalam politik, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kesadaran politik diperlukan karena menyalurkan suara pada pemilihan merupakan hak dari masyarakat serta itu diperlukan karena segala keputusan yang diambil oleh penguasa politik pasti akan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pilpres.

Partisipasi politik tidak semata-mata hanya diartikan secara fisik yaitu memberikan suara pada saat kegiatan pemilu saja, partisipasi bisa dilakukan dalam banyak hal dalam kegiatan berpolitik antara lain partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang. Apapun bentuknya selagi kita memberikan sedikit sumbangsi dalam suatu kegiatan artinya kita telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Namun pada saat ini penulis lebih berfokus kepada partisipasi masyarakat dalam empat aspek

- Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Daftar Pemilih
- Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Kampanye
- Partisipasi Masyarakat dalam Pemberian Suara
- Partisipasi masyarakat dalam Penghitungan suara

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sorong sendiri sudah sangat baik tetapi dari beberapa wawancara pada masyarakat mereka mulai tertarik karena saat melaksanakan kampanye bapak calon presiden sendiri yang datang yang membuat masyarakat tertarik dalam pemilihan presiden dan membuat partisipasinya naik. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya pada partisipasi dan tahapannya sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir pemilihan.

Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah atau kepada pasangan calon akan tercipta apabila telah terjadi kedekatan antara pasangan calon dan juga masyarakat. Kedekatan ini bisa terjadi apabila para pasangan calon melakukan kampanye sehingga menjadi lebih dekat dengan masyarakat, Menyampaikan visi dan misi sehingga bisa membuat ketterarikan dari masyarakat untuk memilih ataupun ikut berpartisipasi dengan menyalurkan suara pada pemilihan umum. Untuk masyarakat sendiri banyak hal yang diperhatikan sebelumnya terhadap pasangan calon sebelum memilih baik dari melihat biografi, pengalaman bekerja serta prestasi-prestasi yang sudah diperoleh. Semua itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan masyarakat untuk menentukan kepercayaan terhadap pasangan calon. Pada kepercayaan terhadap pemerintah sebenarnya masyarakat belum terlalu percaya apalagi kurangnya kedekatan antara pasangan calon dan masyarakat walaupun saat kampanye bapak Ir. H. Joko Widodo sendiri datang saat kampanye tetapi masyarakat sendiri lebih tertarik dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dikarenakan kedekatan yang didapat antara kepala daerah dan masyarakat lebih baik karena kepala daerah sendiri yang lebih mengerti masyarakat di daerah daripada pemerintah pusat dan juga dikarenakan kepala daerah di papua sendiri merupakan orang papua asli yang lebih mengerti kepada masyarakat papua.

Status Sosial Dan Ekonomi

Status sosial adalah tingkat stratifikasi seseorang di dalam lapisan masyarakat. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam lapisan masyarakat berarti peran orang tersebut semakin tinggi dalam masyarakat. Umumnya rendahnya kesadaran politik terjadi kepada masyarakat yang mempunyai status sosial kecil di masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya anggapan bahwa "Siapa pun yang menang dalam ajang pemilu nasib kami tidak akan berubah". hal ini pasti berbeda dengan seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi, contohnya saja dari kalangan pengusaha, tentunya dia akan lebih aktif dalam partisipasi politik dikarenakan takutnya keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemenang pemilu nanti akan berakibat pada pekerjaan yang digelutinya. Pada sosial dan ekonomi memang saat pelaksanaan pemilihan presiden sendiri semua di liburkan dari sekolah hingga perkantoran tapi ini agak kurang berlaku apalagi kepada pedagang dan pengusaha yang di mana tetap membuka toko ataupun kios dikarenakan untuk mencari pemasukan walaupun pada saat pemilihan dan lebih memilih untuk menjalankan usahanya dulu daripada ikut memilih ini juga menjadi catatan bagi KPU sendiri di mana harus membuat solusi agar mengurangi hal ini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi politik orang tua merupakan pengaruh pandangan terkait suatu hal yang diberikan oleh orang lain terhadap seseorang yang bisa menyebabkan terpengaruhnya seseorang terkait pemberian pilihan pada suatu objek. Umumnya bagi pemilih pemula yang baru akan melaksanakan hak untuk memilih yang pertama cenderung mendengarkan apa kata dari orang sekitarnya, hal ini disebabkan karena minimnya wawasan yang dimiliki tentang politik. Pengaruh orang tua sangat berpengaruh dalam pemilihan terutama pada pemilih pemula dimana anak ataupun saudara yang baru pertamakali memilih dikarenakan masih kurang akan pengetahuan dalam pemilihan menyebabkan bimbingan orang tua sangat penting bagi pemilih muda karena pemilihan ini juga dalam jangka lima tahun ke depan. Hal ini membuat Pendidikan dini tentang pemilihan serta demokrasi sangat penting bagi generasi muda yang akan berkontribusi dalam berpolitik di Indonesia.

Pengalaman Berorganisasi

Kesadaran politik masyarakat juga pasti berdampak dari pengalamannya dalam politik. Hal ini selaras karena apabila pengalaman seseorang dalam politik lama maka pemahaman orang tersebut terhadap politik pasti akan baik juga. Sebaliknya jika seseorang tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi maka orang tersebut tidak memiliki pengetahuan terkait politik. Faktor ini juga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Pengalaman berorganisasi dinilai berpengaruh dalam pemilihan karena dalam organisasi mendapat banyak pengalaman terutama dalam masalah politik dimana didapat dengan mengikuti organisasi yang ada di daerah atau tempat tinggal seperti karang taruna, masuk menjadi relawan partai, serta juga organisasi pemuda dan mahasiswa.

Diskusi temuan utama penelitian

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat sehingga penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sorong dapat berjalan dengan baik. Faktor pendekatan antara capres dan cawapres dengan masyarakat merupakan hal positif untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini. Masyarakat Kabupaten Sorong berharap dengan kedekatan yang dilakukan oleh calon capres dan cawapres kepada masyarakat, agar calon tersebut dapat memahami dan mengerti permasalahan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sorong. Kedekatan ini juga berguna untuk mensosialisasikan tentang pemilihan umum ini dan menarik simpatisan para pemilih untuk memilih calon capres dan cawapres tersebut pada hari pemungutan suara. Sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk memilih para kepala negara yang pro atau perpihak terhadap kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Faktor pendekatan antara capres dan cawapres dengan masyarakat merupakan hal positif untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini. Masyarakat Kabupaten Sorong berharap dengan kedekatan yang dilakukan oleh calon capres dan cawapres kepada masyarakat, agar calon tersebut dapat memahami dan mengerti permasalahan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sorong. Kedekatan ini juga berguna untuk mensosialisasikan tentang pemilihan umum ini dan menarik simpatisan para pemilih untuk memilih calon capres dan cawapres tersebut pada hari pemungutan suara. Sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk memilih para kepala negara yang pro atau perpihak terhadap kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Faktor pekerjaan yang memiliki pengaruh lebih besar untuk membuat masyarakat tidak datang ke TPS dan partisipasi yang rendah terdapat di pusat pemerintahan sendiri. Selain itu terdapat juga faktor lain yang menjadi hambatan seperti data daftar pemilih tetap yang tidak terbaru atau di update, ada masyarakat juga yang belum melek politik. Adapun salah satu faktor yang membuat masyarakat berpartisipasi juga adalah faktor kedekatan psikologis antara calon dengan masyarakat. KPU Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penerapan strategi tersebut, antara lain Sosialisasi yang dilakukan merupakan sebuah proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan social dengan masyarakat pada pelaksanaan pemilu. Target sasaran dari KPU Kabupaten Sorong adalah keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, komunitas dan keagamaan. Metode yang dilakukan adalah tatap muka dengan pola ceramah, simulasi pencoblosan, serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pemuktahiran Data Pemilih tetap setiap waktu secara terus menerus dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong agar data masyarakat selalu yang terbaru dan valid. Pemuktahiran data dilakukan dengan sensus dan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong. Pengalohan Sumber daya berkaitan dengan kemampuan dari individu atau organisasi dalam

melaksanakan suatu kegiatan sehingga dengan sumber 83 daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat di Sorong pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat dinilai baik karena mencapai sasaran 73 persen partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU secara Nasional pada PILPRES 2019 tetapi Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat seperti Faktor Pekerjaan masyarakat setempat yang tidak bisa mereka tinggalkan, proses Pendidikan diluar daerah untuk pemilih pemula dan pemuktahiran data pemilih. Ketiga faktor tersebut adalah faktor penghambat yang terjadi dan mempengaruhi angka partisipasi dari masyarakat Kabupaten sorong Sedangkan faktor yang sangat mendukung partisipasi dari masyarakat adalah kedekatan psikologis antara para calon dengan masyarakat setempat. Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong adalah : Memutakhirkan kembali data pemilih untuk Kabupaten Sorong, merekrut kembali sumberdaya manusia yang lebih berkualitas untuk menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemilihan umum, memaksimalkan sosialisasi politik dan Pendidikan politik bagi pemilih, Meningkatkan dan memaksimalkan sarana dan prasana pemilihan umum yang ada di Kabupaten Sorong.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu wilayah/ nagari saja yang digunakan sebagai lokasi penelitian dari penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa ataupun beberapa lokasi yang berbeda yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dimana dengan lebih mendalam akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi agar mengetahui lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Adomince Pandori beserta jajarannya, para pegawai kantor KPU Kabupaten Sorong yang telah membantu banyak dalam pelaksanaan penelitian terutama dalam memberikan informasi sehingga membantu dalam menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, Wahyudin. *Cara Menulis Proposal Penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Harahap N. *Penelitian Kualitatif*. medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Miaz, Yalvema. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang: UNP Press, 2012.
- Samsu. *METODE PENELITIAN : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Surbakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 2013.

Sumber Lain

“Aimas Sudah Memasukan Logistik Hasil Pemilu Ke KPU Kabupaten Sorong.” *Suararakyat*, 2019.

“Partisipasi Pemilih Di Papua Barat Mencapai 90 Persen.” *Medcom*, 2019.

Undang Undang No 10 Tahun 2008, n.d.

Undang Undang No 7 Tahun 2017, n.d.

